

## DAFTAR PUSTAKA

- (KUHPerdata, 2014) Al-syakhshiyah, J. A., Syariah, F., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2010). *KONSTELASI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Bakarbessy, L. (2012). *KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Leonora. XVII(1), 1–9*.
- Campuran, P., & Dari, D. (2011). *TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS : YUNI VS LARRY)*.
- Clarke, B. &. (2006). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN. In *La sociedad de la sociedad* (Vol. 3).
- Dainton, M. (2019). Equity and Relationship Maintenance in First Marriages and Remarriages. *Journal of Divorce and Remarriage*, 60(8), 583–599.  
<https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1586420>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>

- Fabiana Meijon Fadul. (2019a). *KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA INDONESIA DAN WARGA BELANDA)* [Renti. 6(1), 144–158.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019b). *PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.
- Hukum, F., & Kenotariatan, P. M. (2012). *Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Universitas Indonesia*.
- KUHPerdata. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*.
- Lex Suprema, J., Ike Herawati, N., Alamsyah, E., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., & Timur, K. (2021). *KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH THE. III*, 518–532.
- Presiden Republik Indonesia. (1958). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia*.  
www.bphn.go.id
- Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Presiden Republik Indonesia. (2006). **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG**

KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. In *ciedad*.

Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Ilmu Hukum*, 1, 11.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975). *PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan*.

Sinambela, D. M. N. (2022). *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. 90.  
[http://repository.upbatam.ac.id/1486/1/cover\\_s.d\\_bab\\_III.pdf](http://repository.upbatam.ac.id/1486/1/cover_s.d_bab_III.pdf)

Utami, D. P., & Ghifarani, F. K. (2021). Perkawinan Campuran Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156–175.

Wendt, A. (2004). The state as person in international theory. *Review of International Studies*, 30(2), 289–316.  
<https://doi.org/10.1017/S0260210504006084>

朝倉雅史. (2019). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS ANAK YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA PASCA LAHIRNYA UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN JURNAL. In *Carbohydrate Polymers* (Vol. 6, Issue 1).

Al-syakhshiyah, J. A., Syariah, F., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2010). *KONSTELASI PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*.

- Bakarbessy, L. (2012). *KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Leonora*. XVII(1), 1–9.
- Campuran, P., & Dari, D. (2011). *TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS: YUNI VS LARRY)*.
- Clarke, B. &. (2006). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN. In *La sociedad de la sociedad* (Vol. 3).
- Dainton, M. (2019). Equity and Relationship Maintenance in First Marriages and Remarriages. *Journal of Divorce and Remarriage*, 60(8), 583–599. <https://doi.org/10.1080/10502556.2019.1586420>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Fabiana Meijon Fadul. (2019a). *KAJIAN PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (PERKAWINAN ANTARA WARGA INDONESIA DAN WARGA BELANDA) [Renti*. 6(1), 144–158.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019b). *PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN*

*DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.*

Hukum, F., & Kenotariatan, P. M. (2012). *Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Universitas Indonesia.*

KUHPerdata. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.*

Lex Suprema, J., Ike Herawati, N., Alamsyah, E., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., & Timur, K. (2021). *KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH THE. III*, 518–532.

Presiden Republik Indonesia. (1958). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarga-Negaraan Republik Indonesia.*  
www.bphn.go.id

Presiden Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>

Presiden Republik Indonesia. (2006). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.* In *ciedad*.

Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Ilmu Hukum*, 1, 11.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1975). *PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.*